

Community Empowerment through MSME Programs as a Poverty Alleviation Strategy

Shofia Aqila Putri¹.

¹ Program Studi Ilmu Sosial dan Politik.

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: *shofiaaqilaputrii@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Accepted: 14 Nov 2025

Revised: 17 Nov 2025

Published: 22 December
2025

Keywords:

Community
Empowerment, MSMEs,
Poverty, Productivity,
Economic Development.

Poverty is a complex, multifaceted socio-economic issue that remains a major obstacle to development in Indonesia. One approach considered effective in addressing this issue is empowering communities through the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). This article aims to examine the role of UMKM programs as a strategic step in addressing poverty by examining the relationship between community productivity, income, savings, and investment. This research uses a descriptive qualitative method, relying on secondary data from the Central Bureau of Statistics, documents from national and international institutions, and a review of related literature. The analysis findings reveal that low productivity is a primary cause of poverty, directly impacting low incomes, limited savings, and minimal investment among the community. UMKM empowerment programs have proven effective in increasing productivity and income through capacity building, market access, and the application of digital technology. Thus, UMKM development not only serves as a driver of the community economy but also as a strategic tool to break the cycle of poverty and promote inclusive and sustainable economic growth.

I. PENDAHULUAN

Pristiwa kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius bagi Masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Kemiskinan menjadi hal yang tidak bisa di kendalikan karna ini terjadi berulang - ulang setiap tahun. Masyarakat dengan pendapatan kecil dan perkerjaan yang tidak menentu menjadi sumber bahwa kemisikan bisa menjadi rantai yang membawa kesengsaraan bagi Sebagian orang. Badan pusat statistik menyatakan angka kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 23,85 juta orang. angka tersebut menujukan bahwa data kemiskinan makin menurun setiap tahunnya. Badan pusat statistik juga menyebutkan bahwa pada tahun 2024 24,06 persen. Dapat dilihat bahwa semakin naik tahun, semakin banyak menyalami penurunan dan pemerintah Indonesia bisa menanggulangi kemiskinan tersebut (BPS, 2024).

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu strategi utama yang terus diperluas untuk mengatasi masalah kemiskinan di berbagai daerah, khususnya di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kekurangan penghasilan keluarga atau kepemilikan harta ekonomi yang rendah, melainkan sebagai kondisi yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, akses terhadap informasi, kesenjangan peluang, serta batasan kemampuan pribadi dan kelompok. Di banyak wilayah, kemampuan masyarakat yang lemah dalam memanfaatkan sumber daya lokal sering menjadi hambatan utama bagi kemajuan ekonomi (BPS, 2017). Mereka belum sepenuhnya menguasai keterampilan dasar berwirausaha, pengelolaan sumber daya, atau jaringan distribusi yang cukup untuk memperbaiki taraf hidup. Sementara itu, ketergantungan pada lapangan kerja formal terus bertambah, padahal kesempatan kerja tersebut sangat terbatas. Karena itu, pemberdayaan masyarakat sangat krusial sebagai proses

terstruktur untuk meningkatkan kemampuan manusia agar dapat mengelola potensi yang ada secara independen dan lestari.

Di tengah upaya pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah sejak lama diakui sebagai bidang ekonomi yang sangat adaptif dan kuat menghadapi berbagai krisis baik dalam negeri maupun internasional. UMKM bukan hanya berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menampung angkatan kerja, membagikan penghasilan, serta memperkokoh sistem ekonomi nasional yang lebih seimbang (Asian Development Bank, 2017). Saat sektor resmi mengalami kemacetan, UMKM sering kali muncul sebagai pilihan yang membuka kesempatan bagi warga untuk membangun bisnis sendiri. Selain itu, UMKM memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat di level desa, kelurahan, atau kota, dengan cara memanfaatkan sumber daya setempat dan mengubahnya menjadi barang yang memiliki nilai pasar. Dalam rangka memberdayakan masyarakat, UMKM tidak sekadar alat untuk meningkatkan penghasilan, melainkan juga wadah untuk mengembangkan kemampuan, imajinasi, pembaruan, dan kepercayaan diri individu. Oleh karena itu, inisiatif pengembangan UMKM memiliki kedudukan penting dalam membentuk komunitas yang independen, efisien, dan mampu bersaing (World Bank, 2016).

Sejak era reformasi, UMKM telah menjadi prioritas nasional, dengan jumlah unit usaha mencapai lebih dari 64 juta pada tahun 2023 (BPS, 2023). Program pemberdayaan seperti inkubasi bisnis dan pelatihan kewirausahaan telah berhasil meningkatkan daya saing UMKM, terutama di daerah pedesaan dimana kemiskinan paling tinggi (World Bank, 2018). Namun, studi dari Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang tepat, UMKM sering kali gagal berkembang karena keterbatasan akses pasar

dan teknologi (ADB, 2022). Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan melalui UMKM harus mencakup aspek holistik, termasuk pendidikan, akses informasi, dan penguatan institusi lokal.

Dalam konteks inovasi, pemberdayaan UMKM juga melibatkan adopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi ini, dengan peningkatan penggunaan e-commerce sebesar 200 persen di kalangan UMKM (Bank Indonesia, 2021). Program seperti Go Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melatih lebih dari 10 juta pelaku UMKM untuk go digital, yang tidak hanya meningkatkan penghasilan tetapi juga membuka akses pasar internasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022). Penelitian dari IMF pada tahun 2023 menekankan bahwa digitalisasi UMKM dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, dengan potensi pengurangan kemiskinan hingga 5 persen melalui peningkatan efisiensi (IMF, 2023).

Dalam konteks global, pengalaman negara seperti Vietnam dan Thailand menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dapat mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 50 persen dalam waktu 10 tahun (UNDP, 2016). Di Indonesia, hal serupa terlihat dalam program-program seperti Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan (GNKP), dimana UMKM menjadi komponen utama (Kementerian Sosial, 2021). Penelitian empiris dari Tambunan (2020) dalam Journal of Southeast Asian Economies menegaskan bahwa UMKM yang diberdayakan dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, sehingga berkontribusi pada distribusi penghasilan yang lebih merata

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana Masyarakat melalui program UMKM. Pendekatan dipilih karena sebagai analisis bagaimana Masyarakat dalam perbedayaan UMKM sebagai pengetas kemiskinan yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

Pendekatan Penelitian ini termasuk dalam penilitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkatan perkembangan program UMKM sebagai kajian dari strategi pengentasan kemiskinan dan memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana program UMKM berkontribusi pada pengurangan kemiskinan multidimensi, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan psikologis.(Miles et al., 2014).

Sumber data

Sumber data dalam penelitian terdiri dari:

- a. sumber primer: wawancara mendalam yang focus pada manfaat program pemerintah dan pertanyaan terbuka tentang pengalaman dalam pemberdayaan terbuka dan dampak program UMKM terhadap kehidupan mereka, observasi partisipan dalam pemberdayaan UMKM Masyarakat setempat.
- b. sumber data sekunder: buku, artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tentang program UMKM, Solusi dari program tersebut, dan sumber relevan lainnya yang menjadi pedoman penilitian. Di antarnya;
 1. Asian Development Bank. (2017). *Laporan tentang Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Manila: Asian Development Bank.

2. Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
3. Badan Pusat Statistik. (2017). *Laporan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
4. World Bank. (2016). *Laporan tentang Pemberdayaan UMKM sebagai Wadah Pengembangan Komunitas*. Washington, DC: World Bank.
5. Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
6. World Bank. (2018). *Studi tentang Program Inkubasi Bisnis dan Pelatihan Kewirausahaan untuk UMKM di Daerah Pedesaan*. Washington, DC: World Bank.
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Program Go Digital untuk UMKM*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Bank Indonesia. (2021). *Laporan Penggunaan E-commerce oleh UMKM selama Pandemi COVID-19*. Jakarta: Bank Indonesia.
9. Asian Development Bank. (2022). *Studi tentang Intervensi untuk Pengembangan UMKM di Asia*. Manila: Asian Development Bank.
10. International Monetary Fund. (2023). *Penelitian tentang Dampak Digitalisasi UMKM terhadap Pengurangan Kesenjangan Ekonomi*. Washington, DC: International Monetary Fund.
11. United Nations Development Programme. (2016). *Pengalaman Negara-negara Asia dalam Pemberdayaan UMKM untuk Pengurangan Kemiskinan*. New York: United Nations Development Programme.

12. Kementerian Sosial. (2021). *Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan (GNKP)*. Jakarta: Kementerian Sosial.

Teknik Pengumpulan Data

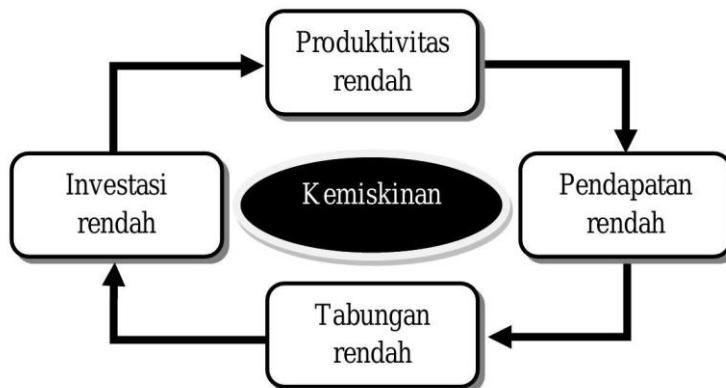
pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan multi sumber yang melibatkan data sekunder dari lembaga resmi dan internasional, guna memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi mengenai tren kemiskinan serta kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Analisis Data

Analisis Data melalui pengumpulan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi survei nasional berkala untuk mengukur persentase penduduk miskin. Misalnya, data untuk tahun 2024 menunjukkan angka 24,06 persen, yang dikumpulkan melalui survei rumah tangga yang mencakup indikator seperti pendapatan, konsumsi, dan akses terhadap sumber daya. Data dianalisis dalam tiga tahapan:

- a. Reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan fokus pada kajian.
- b. Penyusunan data, yaitu Menyusun data melalui sumber-sumber yang ada: UMKM sebagai pembantu ekonomi Masyarakat, pemberdayaan UMKM juga melibatkan adopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing.
- c. Penarikan Kesimpulan, perumusan gagasan inti yg merujuk bahwa UMKM dalam pendukung utama dalam ekonomi Masyarakat luas.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL



1. Produktivitas Rendah sebagai Akar Permasalahan Kemiskinan

Produktivitas rendah merupakan salah satu faktor awal yang menyebabkan dan memperkuat kemiskinan di masyarakat. Produktivitas dapat dipahami sebagai kemampuan individu atau kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang tersedia. Pada masyarakat miskin, tingkat produktivitas sering kali berada pada level yang rendah akibat keterbatasan kualitas sumber daya manusia, minimnya keterampilan kerja, rendahnya akses terhadap teknologi, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.

2. Pendapatan Rendah sebagai Dampak dari Produktivitas yang Terbatas

Produktivitas yang rendah secara langsung berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan merupakan hasil ekonomi yang diperoleh individu atau rumah tangga dari aktivitas produksi, baik berupa upah, keuntungan usaha, maupun pendapatan lainnya. Ketika produktivitas rendah, output yang dihasilkan juga terbatas sehingga pendapatan yang diterima tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Pendapatan rendah menjadi ciri utama masyarakat miskin. pendapatan rendah sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses pasar, rendahnya nilai jual produk, serta lemahnya posisi tawar pelaku usaha kecil. Banyak UMKM hanya beroperasi di pasar lokal dengan jangkauan konsumen terbatas.

3. Tabungan Rendah dan Ketidakmampuan Masyarakat Mengakumulasi Modal

Rendahnya pendapatan menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menabung. Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang disisihkan untuk kebutuhan masa depan atau pengembangan ekonomi. Pada masyarakat miskin, hampir seluruh pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak ada sisa pendapatan yang dapat dialokasikan sebagai tabungan. Banyak pelaku UMKM tidak mampu memperbesar skala produksi, membeli peralatan baru, atau melakukan inovasi produk karena keterbatasan modal. Akibatnya, usaha yang dijalankan tetap berada pada skala kecil dan sulit berkembang. UMKM dapat membantu meningkatkan kemampuan menabung masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan literasi keuangan. Edukasi mengenai pengelolaan keuangan usaha dan rumah tangga menjadi bagian penting dari pemberdayaan.

4. Investasi Rendah dan Terhambatnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Tabungan yang rendah menyebabkan investasi di masyarakat juga menjadi rendah. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam berbagai bentuk, baik untuk pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, pendidikan, maupun perbaikan teknologi.

Tanpa tabungan dan akses modal, masyarakat miskin tidak mampu melakukan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Program UMKM yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan mampu mendorong investasi masyarakat. Kredit usaha mikro, bantuan modal, serta kemitraan usaha memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk melakukan investasi produktif.

Simpulan

Pemberdayaan Masyarakat sebagai strategi pengentasan kemiskinan ini merupakan analisis mendalam mengenai kemiskinan di masyarakat, terutama melalui lensa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program UMKM menjadi pacuan utama Masyarakat luas dalam Pembangunan perekonomian Indonesia maupun dunia. Dengan adanya program tersebut, kurva Tingkat kemiskinan semakin rendah dan program juga menguntungkan banyak pihak dalam kerja samanya.

Terdapat beberapa poin Kesimpulan yang dapat diambil:

1. Produktivitas Rendah sebagai Akar Permasalahan Kemiskinan

produktivitas rendah sebagai akar permasalahan kemiskinan menekankan bahwa kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan efisien adalah fondasi utama kesejahteraan ekonomi. Produktivitas yang rendah, yang sering kali disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya keterampilan, akses teknologi yang minim, dan infrastruktur yang tidak memadai, membuat masyarakat miskin sulit beradaptasi dengan dinamika pasar modern. Di UMKM tersendiri ini terlihat dari proses produksi yang masih tradisional, seperti penggunaan alat manual dan manajemen yang kurang profesional, yang menghasilkan produk dengan kualitas rendah dan daya saing lemah. Akibatnya, masyarakat ini terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak menghasilkan nilai ekonomi

tinggi, memperkuat kemiskinan dari generasi ke generasi.

2. Pendapatan Rendah sebagai Dampak dari Produktivitas yang Terbatas

pendapatan rendah sebagai dampak langsung dari produktivitas terbatas menyoroti bagaimana output yang minim langsung mengurangi penghasilan masyarakat. Pendapatan, yang berasal dari upah, keuntungan usaha, atau sumber lain, sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar ketika produktivitas rendah, karena produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang kecil dan akses pasar yang terbatas. Di kalangan UMKM, ini tercermin dalam operasi yang hanya berfokus pada pasar lokal dengan konsumen terbatas, sehingga posisi tawar mereka lemah. Simpulan ini menggarisbawahi bahwa pendapatan rendah bukan sekadar gejala, melainkan konsekuensi logis dari ketidakmampuan menghasilkan barang dan jasa yang kompetitif. Dengan demikian, masyarakat miskin terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak stabil, di mana setiap fluktuasi ekonomi dapat memperburuk situasi. Untuk mengatasinya, intervensi seperti peningkatan keterampilan dan akses pasar yang lebih luas diperlukan, agar UMKM dapat meningkatkan nilai produk mereka dan, pada akhirnya, pendapatan.

3. Tabungan Rendah dan Ketidakmampuan Masyarakat Mengakumulasi Modal

bahwa pendapatan yang minim membuat masyarakat sulit menyisihkan dana untuk masa depan. Tabungan, sebagai bagian pendapatan yang dialokasikan untuk investasi atau kebutuhan jangka panjang, hampir tidak ada di kalangan miskin, karena seluruh penghasilan habis untuk biaya harian. Ini menghambat UMKM dalam memperbesar skala produksi, membeli peralatan, atau berinovasi,

sehingga usaha tetap kecil dan tidak berkembang. Edukasi literasi keuangan dan program UMKM yang meningkatkan pendapatan menjadi solusi kunci, memungkinkan masyarakat untuk mulai menabung dan mengakumulasi modal.

4. Bawa tabungan yang minim langsung membatasi kemampuan berinvestasi.

Investasi, yang meliputi pengembangan usaha, pendidikan, atau teknologi, menjadi sulit tanpa modal, sehingga produktivitas dan kesejahteraan tetap stagnan. Program UMKM yang didukung kredit mikro, bantuan modal, dan kemitraan dapat mendorong investasi produktif, memungkinkan masyarakat untuk berkembang. investasi rendah adalah penghalang utama pembangunan ekonomi, karena tanpa penanaman modal, masyarakat miskin tidak dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan. Hal ini juga menyoroti peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung, seperti subsidi atau insentif untuk investasi kecil. Dengan investasi yang ditingkatkan, UMKM dapat menjadi mesin pertumbuhan, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk ekonomi lokal dan nasional, memutus rantai kemiskinan melalui inovasi dan ekspansi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. (2017). *Laporan tentang Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Manila: Asian Development Bank.

Asian Development Bank. (2022). *Studi tentang Intervensi untuk Pengembangan UMKM di Asia*. Manila: Asian Development Bank.

Badan Pusat Statistik. (2017). *Laporan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2021). *Laporan Penggunaan E-commerce oleh UMKM selama Pandemi COVID-19*. Jakarta: Bank Indonesia.

International Monetary Fund. (2023). *Penelitian tentang Dampak Digitalisasi UMKM terhadap Pengurangan Kesenjangan Ekonomi*. Washington, DC: International Monetary Fund.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Program Go Digital untuk UMKM*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

United Nations Development Programme. (2016). *Pengalaman Negara-negara Asia dalam Pemberdayaan UMKM untuk Pengurangan Kemiskinan*. New York: United Nations Development Programme.

World Bank. (2016). *Laporan tentang Pemberdayaan UMKM sebagai Wadah Pengembangan Komunitas*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2018). *Studi tentang Program Inkubasi Bisnis dan Pelatihan Kewirausahaan untuk UMKM di Daerah Pedesaan*. Washington, DC: World Bank.